



## GANTIKAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

# Tata Kawasan Kumuh, Digelontor Rp 14 M

**YOGYA (KR)** - Kota Yogyakarta tahun ini akan memperoleh dana sebesar Rp 14 miliar dari pemerintah pusat. Alokasi tersebut untuk pengentasan kawasan kumuh menggantikan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Kepala Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta Hendra Tantular mengungkapkan, alokasi tersebut hampir tiga kali lipat dibanding dana PNPM tahun lalu.

"Dana PNPM 2014 kemarin Yogya dapat Rp 5,4 miliar. Mulai tahun ini kan PNPM sudah tidak berjalan dan diganti pengentasan kawasan kumuh. Dana Rp 14 miliar cukup besar," paparnya, Minggu (22/2).

Hendra menambahkan, total alokasi untuk DIY sebenarnya Rp 38 miliar. Namun Kota Yogyakarta mendapatkan kuota terbanyak dibanding daerah lain karena dinilai oleh pusat berhasil dalam mengelola program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK).

Teknis pengelolaan dana akan didahului dengan pembentukan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Ban-kin) tingkat kota. Selanjut-

nya, satker tersebut akan menentukan kawasan kumuh yang menjadi target pengentasan.

"Dalam waktu dekat kami akan diundang ke Jakarta untuk menandatangani nota kesepahaman pengelolaan dana. Setelah itu kegiatan bisa berjalan. Tahun ini harus tuntas," imbuhnya.

Disinggung mengenai kawasan kumuh perkotaan, menurut Hendra banyak terdapat di bantaran sungai. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan target penataan akan menyasar kawasan tersebut. Apalagi tiga sungai besar di Kota Yogyakarta yakni Gajah Wong, Winongo dan Code sudah memiliki kelemahan atau forum komuni-

kasi yang kuat.

Disamping itu, masing-masing forum komunikasi masyarakat bantaran sungai juga sudah memiliki perencanaan penataan yang disusun secara mandiri.

"Misal nanti dana itu kurang, maka Bank Dunia siap turut berperan. Kepercayaan ini harus dijaga dengan baik," tandasnya.

Sementara Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Suwanto berharap, masyarakat tidak sekadar menjadi objek penataan. Pembangunan infrastruktur itu nantinya harus melibatkan peran serta warga sejak dari tahap perencanaan. Hal ini agar hasil pengentasan kawasan kumuh sesuai kebutuhan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005